

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Komunikasi merupakan sarana paling utama dalam kehidupan manusia, yang berarti tak seorang pun yang dapat menarik diri dari proses ini, baik dalam fungsinya sebagai individu maupun makhluk sosial. Komunikasi ada dimana-mana, seperti di rumah, sekolah, kantor, rumah sakit, dan di semua tempat yang melakukan sosialisasi. Artinya, hampir seluruh kegiatan manusia selalu tersentuh komunikasi.<sup>1</sup>

Istilah pola komunikasi biasa disebut juga sebagai model tetapi maksudnya sama, yaitu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan keadaan masyarakat. Pola adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang biasa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika yang ditimbulkan cukup mencapai suatu sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat.<sup>2</sup>

Laswell mengatakan bahwa komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan “siapa” mengatakan “apa” dengan saluran apa, kepada siapa

---

<sup>1</sup> Dedy mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 13

<sup>2</sup><http://id.wikipedia.com> 23 Juni 2019, diakses tanggal 12 Februari 2020.

dan dengan akibat hasil apa, (*Who? says what? In which channel? To whom? With what effect*).<sup>3</sup>

Paradigma Laswell menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur yaitu :

1. Komunikator (sender atau pengirim pesan atau berita)<sup>4</sup>
2. Pesan atau berita (*message*)<sup>5</sup>
3. Komunikasikan<sup>6</sup>
4. Media<sup>7</sup>
5. Efek<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini, masyarakat bertindak sebagai komunikator (*who say*), informasi yang disampaikan berupa gagasan atau keluhan (*what*), lalu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertindak sebagai media penyampai informasi (*in which channel*) yang akan menyampaikan informasinya kepada Pemerintah Desa (*to whom*) yang kemudian Pemerintah Desa akan bertindak lanjut gagasan atau keluhan masyarakatnya ke dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa (*with what effect*).<sup>9</sup>

Dalam menampung aspirasi masyarakat, BPD dengan masyarakat menggunakan pola komunikasi piramida. Dimana informasi yang disampaikan dari

---

<sup>3</sup> Dedy mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 69.

<sup>4</sup> H.A.W. Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 12.

<sup>5</sup> Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 17-18.

<sup>6</sup> Ending Lestari dan Malik, *Komunikasi Yang Efektif Bahan Ajar Diktat Prajabatan Golongan III* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003), 8.

<sup>7</sup> *Ibid*, 8.

<sup>8</sup> Dedy mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 14.

<sup>9</sup> Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.

ketua BPD ke anggota satu sampai ke anggota yang lainnya dapat diinformasikan kembali kepada ketua. Sehingga, hasil dari komunikasinya tidak terjadi kesalahpahaman.<sup>10</sup> Komunikasi yang digunakan BPD kepada Pemerintah Desa menggunakan komunikasi satu arah. Dimana bila pesan yang disampaikan BPD kepada Pemerintah Desa bisa langsung tersalurkan tanpa adanya gangguan-gangguan tertentu.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana pola komunikasi yang digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Masa Pandemi di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Pola Komunikasi BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa  
Pada Masa Pandemi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Bab V, hlm. 75

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 76

Untuk menggambarkan pola Komunikasi BPD dalam pelaksanaan pembangunan pada masa pandemi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kajian komunikasi yang baik dalam melakukan tugas-tugas BPD sebagai wakil dari masyarakat di Desa, serta melaksanakan peranan BPD dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan sesuai asas pancasila di Desa. Di samping itu ada juga manfaat lain yaitu :

##### 1. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang komunikasi yang efektif dalam berorganisasi di tingkat Desa dan referensi ilmiah bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah yang ingin melakukan penelitian komunikasi dalam bidang komunikasi Organisasi.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Lembaga

IAIN Kediri, penelitian ini digunakan sebagai pedoman diri dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang komunikasi Organisasi yang ada di Desa maupun lembaga.

###### b. Bagi Organisasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Organisasi (BPD) agar dijadikan bahan masukan dalam proses komunikasi yang baik dan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dalam hal komunikasi kepada pemerintah Desa maupun masyarakat

#### c. Bagi Desa

Melalui penelitian ini diharapkan Desa dapat meningkatkan kinerjanya dalam proses pembangunan dan mengayomi masyarakatnya, serta dapat menjalin komunikasi yang baik antara BPD dan masyarakat, dan dapat menjalin kordinasi yang baik untuk kemajuan Desa.

#### d. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pengalaman, kemampuan serta ketrampilan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam pembelajaran selama mengikuti mata kuliah ataupun saat magang.

### **E. Kajian Pustaka**

1. JOM FISIP Vol. 4 No. 1 Februari 2017, Pola Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kempar Tahun 2014-2015, Oleh Endi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang berarti proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak selama penelitian dan kemudian dilanjutkan

dengan menghubungkan teori-teori yang ada. Pola hubungan sejajar antara anggota BPD dan Kepala Desa yang diatur dalam perundang-undangan ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis, dan mengarah kepada terjadinya konflik serta mewujudkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala Desa atas BPD dalam pembangunan Desa. Selain itu, adanya anggapan bahwa BPD bukanlah mitra melainkan lawan, serta BPD yang merasa bahwa kehadirannya tidak di hargai.

2. Muhammad Rifqi, Komunikasi Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Program Studi Ilmu Komunikasi, STPMD “APMD” Yogyakarta, Tahun 2018.

Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang akan mendeskripsikan peranan dan kendala BPD dalam perencanaan pembangunan, di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tergambar BPD Desa Terong telah melaksanakan fungsinya dalam menunjang kelangsungan pembangunan,

dan bersama kepala desa menetapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran BPD di Desa Terong telah memberikan ruang atau celah gerak yang sangat positif dalam masyarakat desa dengan menyampaikan tuntutan dan hak mereka. BPD di Desa Terong merupakan wahana dalam menampung aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus berperan dalam membuat kebijakan bersama kepala desa.

3. Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, Oleh Muhammad Saidil, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengambilan informan sebanyak 7 (tujuh) orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive* sampling. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi dan dokumentasi yang dikembangkan melalui wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Komunikasi politik antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa yaitu bentuk kemitraan, konsultasi, dan koordinasi. Komunikasi politik antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa menunjukkan komunikasi yang baik, hanya saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mattiro Walie belum maksimal terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. 2). Faktor-faktor yang menghambat komunikasi politik terdiri dari; a). Faktor pendukung

komunikasi politik yaitu masyarakat dan Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa; b). Faktor penghambat komunikasi politik yaitu sarana, pola komunikasi, tidak memahami fungsi dan Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD.